

TEKS BERITA KONFLIK PEKERJA PT FREEPORT INDONESIA: ANALISIS WACANA KRITIS FOUCAULT

D. Jupriono*

Yudhi Hari Wibowo**

Linusia Marsih***

ABSTRACT. This study reports a critical discourse analysis on news reports on labour conflicts at PT Freeport Indonesia. The study adopts Foucault's approaches to critical discourse analysis. According to Foucault, a discourse is an organized language constructing social practice in order to change or to maintain power domination. In this perspective, language is recognized as both the power and the instrument. The analysis article examines the news on the PT Freeport Indonesia labour conflict from the viewpoints of topic, data, theme identification, the search of hidden discourse elements, the search of meaning relationship among the discourse elements, the contextualization of the discourse elements of the power-knowledge network. The results show that the difference of the wages based on biopolitical practices under the basis of race discrimination among the Freeport labours triggered the horizontal conflict that was settled under the control of the company. The study also found an indication of a practice of panoptic. This control was effective to settle the conflict because it demanded the obedience productivities on the side of the labours. However, this kind of control camouflaged the reality of the Freeport's massive profit gaining, Freeport's exploration that damaged the environment, and Timika people's living in poverty.

Key words: *critical discourse analysis, race discrimination, biopolitic, hidden elements, knowledge power*

PENDAHULUAN

Sesungguhnya pers memiliki tugas besar dan mulia: mengembangkan wacana yang sehat demi kepentingan rakyat banyak. Secara lebih khusus, pers seyogianya lebih berempati kepada pihak-pihak yang dirugikan dan menderita (Mulyana 2008). Untuk mencapai tugas mulia tersebut, jurnalisme pertama-tama harus memegang kebenaran. Kebenaran ini diabdikan untuk kepentingan warga. Intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi, sehingga bisa memantau kekuasaan dan “menyuarakan kaum yang tak beres suara”. Ini petuah Bill Kovach, pemimpin redaksi harian *Atlanta Journal-Constitution*, dan Tom Rosenstiel, kritikus harian *Los Angeles Times* (Kovach & Rosenstiel 2001).

Apakah dinamika kerja wartawan Indonesia telah sesuai dengan saran-saran ini? Taruhlah, misalnya, berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Aksi Intimidasi Karyawan” (harian *Berita Metro*, 28/2/2012, hal. 5), yang akan dibahas dalam tulisan ini. Jika analisis isi (*content analysis*, Bungin 2003) yang dipakai untuk membedah berita tersebut, kemungkinan akan didapat temuan bahwa berita tersebut sudah disajikan sesuai dengan prinsip dasar penulisan berita (5W + 2H; Sumadiria 2006) dan isi berita yang ditangkap adalah sesuai dengan judulnya, yakni terhentinya proses produksi Freeport akibat aksi intimidasi pekerja—tidak kurang, tidak lebih! Akan tetapi, dengan analisis wacana (Littlejohn 1996; van Dijk 2005), dari berita yang sama, dapat diperoleh temuan lebih menukik, bahkan menyingkap fakta yang terselubung. Untuk tujuan inilah maka penelitian

* Drs. D. Jupriono, M.Si., staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP dan Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

** Drs. Yudhi Hari Wibowo, M.Si., staf pengajar dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; Ketua Redaksi Jurnal *Dinamika Administrator*

*** Linusia Marsih, S.S., M.Pd., dosen Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ini memilih pendekatan analisis wacana kritis versi Michel Foucault (Haryatmoko 2012; cf. Bungin 2003) untuk menganalisis pemberitaan seputar konflik tenaga kerja yang terjadi dalam PT Freeport Indonesia.

Mengapa mesti Freeport? PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang emas, tembaga, silver, *molybdenum*, *rhenium*, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (USA). Sebagai pembayar pajak terbesar kepada Indonesia, PT Freeport Indonesia merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Freeport telah melakukan eksplorasi di Papua, tepatnya di Erstberg (dari 1967) dan Grasberg (sejak 1988), Tembaga Pura, Timika, Provinsi Papua. Keuntungan triliunan direguk oleh Freeport yang berkolusi dengan penguasa, sebaliknya penduduk setempat hanya menjadi buruh yang justru mengalami kekerasan, pengusiran, penganiayaan, serta kerusakan lingkungan tiada tara.

Memang, Freeport sering memicu konflik. Ada konflik penduduk setempat dengan perusahaan beserta aparat keamanan; konflik pekerja Freeport dengan perusahaan; konflik antarpekerja, yakni kelompok pekerja yang penduduk asli dengan kelompok pekerja pendatang.

Fokus kajian ini adalah analisis teks berita konflik pekerja Freeport dalam perspektif analisis wacana kritis versi Foucault. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyingkap secara mendalam tentang berbagai aspek realita dalam konflik yang ditunjukkan secara sistematis dalam analisis wacana kritis versi Foucault terhadap pemberitaan melalui media.

WACANA: PRAKTIK BAHASA YANG MENGKONSTRUKSI PRAKTIK SOSIAL

Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*, CDA) memfokuskan kajiannya pada bahasa sebagai faktor penting untuk membangun, mempertahankan, sekaligus mengkritisi praktik kekuasaan yang memproduksi ketimpangan relasi dan ketidakadilan sosial (van Dijk 2005). Inilah ciri khas analisis wacana kritis yang membedakannya dari analisis wacana pendahulunya, analisis wacana (deskriptif) (Woodside-Jiron 2004; Eriyanto 2005).

Bila analisis wacana kritis dikhususkan pada versi Michel Foucault, ciri yang menonjol adalah difokuskannya kajian terhadap bahasa (termasuk bahasa rubrik berita media cetak) pada konflik-konflik kecil sporadis antarindividu sebagai subjek dan objek kecil praktik kekuasaan (O'Farrell 2007; Kelly 2010; Haryatmoko 2012). Sementara, kebanyakan tokoh lain selalu memfokuskan kajiannya pada konflik-konflik besar yang melibatkan kekuasaan negara, pemimpin publik, atau tokoh gerakan makar. Konflik GAM dan GPM *vs* Pemerintah Pusat RI, misalnya, tidak sesuai dikaji dari perspektif Foucault. Akan tetapi, konflik kelompok buruh dari warga asli Timika, Papua, dengan kelompok buruh yang berasal dari luar Papua, yang pecah di beberapa titik lokasi PT Freeport—yang adalah fokus tulisan ini—amat sesuai memanfaatkan tesis-tesis wacana kekuasaan Foucault (cf. Woodside-Jiron 2004).

Wacana—termasuk di dalamnya wacana berita media—dalam perspektif analisis wacana kritis, banyak merepresentasikan realitas sosial yang penuh dengan selubung dominasi kekuasaan dan konflik (cf. Jupriono, 2010). Analisis wacana kritis memandang wacana sebagai praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik-praktik sosial (berbicara, berpikir, bertindak) untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan.

Tokoh analisis wacana kritis yang memberi banyak perhatian pada dimensi kekuasaan secara khas adalah Michel Foucault (1926-1984), seorang filosof-kekuasaan berkebangsaan Prancis. Menurut Foucault, kekuasaan itu menyebar tanpa bisa dilokalisasi, “ada di mana-mana”, meresap dalam seluruh relasi sosial; subjek kekuasaan tidak harus seorang raja, perdana menteri, atau presiden terhadap rakyatnya, bahkan ia bisa muncul dalam relasi suami istri, sepasang kekasih, dokter-pasien, psikiater-klien, dosen-mahasiswa, antarmahasiswa, antarburuh, dst. (cf. O’Farrell 2007; Kelly 2010).

Kekuasaan tidak dimonopoli siapa pun, tetapi beroperasi dalam relasi pengetahuan dan situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan merupakan tatanan disiplin yang melekat pada ambisi pengetahuan, yang tidak selalu represif, tetapi produktif. Kekuasaan muncul manakala terdapat perbedaan dan diskriminasi (Foucault 2011). Kontrol kekuasaan dijalankan dengan mekanisme disiplin, normalisasi, sistem panoptik, klasifikasi, dan identifikasi (Haryatmoko, 2010; 2012). Tokoh yang meninggal digerogoti AIDS ini berbicara bagaimana kuasa dilihat, diterima, dipraktikkan sebagai kebenaran dan berfungsi dalam bidang-bidang tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam perspektif Foucault, yang dikedepankan adalah paradigma kritis (*critical paradigm*). Teknik analisis wacana kritis Foucault bukan saja lain sama sekali dari analisis wacana biasa (Littlejohn 1996), melainkan juga dengan sesama analisis wacana kritis versi lain (van Dijk, Fairclough, van Leeuwen, Mills, Fowler, dan Bourdieu). Analisis teks berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” dalam perspektif analisis wacana kritis Foucault dalam dalam kertas kerja ini mengikuti formula yang disusun Alba-Juez (2009) berikut: (i) seleksi topik, (ii) pendalaman data, (iii) identifikasi tema, (iv) pencarian unsur-unsur wacana yang absen/ tersembunyi, (v) pencarian relasi makna antar unsurwacana, dan (vi) kontekstualisasi unsur wacana dalam jaringan kekuasaan-pengetahuan.

Data utama kajian ini adalah berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Aksi Intimidasi Karyawan” (*Berita Metro*, 28 Februari 2012: 5). Data ini terbangun dari 11 paragraf. (Demi efisiensi, selanjutnya istilah *paragraf* cukup ditulis sebagai *p*; paragraf 1 akan ditulis sebagai *p1*, paragraf 2 sebagai *p2*, dst.). (Data dilampirkan dalam Tabel 2 di akhir artikel)

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Dalam analisis wacana kritis terhadap pemberitaan tentang konflik pekerja di PT Freeport, hasil dan pembahasan didiskusikan sesuai dengan enam (6) tahapan analisis secara sistematis sebagai berikut.

1. Seleksi Topik

Pada tahap I seleksi topik, pembaca dihadapkan pada beberapa topik. Topik utama, tentu saja, adalah terhentinya proses produksi Freeport sebagai akibat konflik antarburuh. Jika diformulasikan sesuai dengan bahasa Foucault, topik ini langsung bersangkutan dengan konsep kekuasaan yang menyebar dan produktif dengan mekanisme prosedur pelarangan, pemisahan, dan opisi (Haryatmoko, 2012). Dalam konteks PT Freeport

kekuasaan tidak hanya dipraktikkan oleh pihak manajemen Freeport, tetapi juga di antara pekerja, yakni antara pekerja yang melancarkan mogok kerja dan pekerja yang tidak ikut mogok kerja (p3, p9, p10).

- 1) Paragraf 3:
Intimidasi yang dilakukan karyawan peserta mogok kerja terhadap rekan-rekan mereka tidak terjadi di seluruh areal kerja PT Freeport tapi hanya di beberapa titik sehingga manajemen yang menangani langsung di lapangan mengambil keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas produksi,” jelas Dionisius, Senin (27/2)
- 2) Paragraf 9:
Di antara pekerja yang kembali bekerja terdapat beberapa yang telah melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap rekan-rekan mereka yang tidak mengikuti aksi mogok kerja dan terhadap para penyeliannya,” tutur Ramdani.
- 3) Paragraf 10:
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa untuk membicarakan masalah yang terjadi antara karyawan yang mogok kerja dengan rekan-rekan mereka yang tidak ikut mogok kerja ...

Prosedur pelarangan, pemisahan, dan oposisi tampak antara: pekerja yang mogok dengan pekerja yang tidak mogok (p3, p9, p10), Pemkab Timika dengan manajemen PT Freeport (p4, p5), serikat pekerja dengan manajemen Freeport (p8), serta serikat pekerja dengan Kapolda Papua (p11).

- 4) Paragraf 4:
... hingga saat ini manajemen PT Freeport belum memberikan laporan secara resmi tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi perusahaan kepada Pemkab Mimika hingga memicu terhentinya aktivitas produksi perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu ...
- 5) Paragraf 5:
“Laporan secara resmi dari manajemen Freeport belum ada sehingga kami tidak tahu persis permasalahan apa yang terjadi, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk membangun komunikasi antara manajemen dengan karyawan,” ujar Dionisius.
- 6) Paragraf 8:
... PT Freeport telah mengikuti semua persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII yang ditandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu dengan pihak Serikat Pekerja.
- 7) Paragraf 11:
Bersamaan dengan itu pada Senin siang sejumlah Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja PT Freeport menggelar pertemuan dengan Kapolda Papua Iren Pol Bigman Lumban Tobing bertempat di Hotel Rimba Papua, Timika.

2. Pendalaman Data

Langkah II pendalaman data ditempuh dengan memahami teks data berita “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” (*Berita Metro*, 28 Februari 2012). Langkah ini diikuti dengan melacak informasi sebelum dan sesudahnya yang relevan. Untuk ini tidak boleh diabaikan berita-berita lain sbb. (Perhatikan Tabel 1):

Tabel 1 Sumber-sumber Berita untuk Pendalaman Data

NO	JUDUL BERITA	MEDIA, EDISI
1	“Unjuk Rasa Karyawan Freeport Berujung Bentrok”	<i>Fajar</i> , 11 Oktober 2011
2	“Freeport Indonesia”	http://id.wikipedia.org/wiki , Januari 2012
3	“Tambang Banyak Picu Masalah”	<i>Kompas</i> , 20 Februari 2012: 1, 15
4	“Laba Freeport Mengalami Penurunan 60%”	www.tribunnews.com , 21 Januari 2012

5	“Hatta: Royalti Freeport Jangan Hanya 1%”	<i>www.tribunnews.com</i> , 21 Februari 2012
6	“2011, Freeport Setor Rp 21 T”	<i>Jawa Pos</i> , 22 Februari 2012: 5
7	“Desak Freeport Naikkan Royalti”	<i>Berita Metro</i> , 22 Februari 2012: 1, 7
8	“Freeport Kembali Bergejolak”	<i>Kontan</i> , 24 Februari 2012
9	“Pekerja Bersengketa, Freeport Hentikan Produksi”	<i>Kontan</i> , 27 Februari 2012
10	“Menata Aturan Pertambangan di Indonesia: Rawan KKN, Kontrol dan Pengawasan Lemah”	<i>Berita Metro</i> , 27 Februari 2012: 5
11	“Produksi Freeport Berhenti Sementara Akibat Intimidasi Karyawan”	<i>Berita Metro</i> , 28 Februari 2012: 5

Langkah ini adalah salah satu kekhasan wacana dalam perspektif Foucault (Alba-Juez 2009). Pemahaman terhadap isi suatu teks membutuhkan kehadiran teks-teks lain yang mengangkat topik yang sama. Setiap teks, baik saat diproduksi maupun ketika dipahami isinya, senantiasa berkaitan dengan teks-teks sebelum dan sesudahnya. Meski tidak semuanya, prinsip intertekstualitas menjadi amat relevan untuk dihadirkan dalam mendalami isi sebuah teks (cf. van Dijk 2005; Kovacs 2005).

3. Identifikasi Tema

Identifikasi tema terhadap teks-teks berita tersebut menghasilkan setidaknya tiga tema berikut: (a) kekuasaan itu produktif; (b) kekuasaan itu menyebar dengan mekanisme diskriminasi; (c) teknik panoptik efektif untuk menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan pekerja.

a) *Kekuasaan itu produktif*

Meskipun hanya sebagai “tamu”, tidak sulit menangkap kesan bahwa Freeport mengendalikan banyak hal di bumi Papua. Kekuasaan Freeport berbuah produktivitas; Freeport mengeruk keuntungan sangat besar dengan mengeksploitasi habis-habisan lingkungan alam Timika. Akan tetapi, produktivitas kekuasaan harus dibaca terbalik: Freeport juga telah memantik tumbuhnya kesadaran, keberanian, dan konsolidasi di kalangan pekerjanya. Di sini kekuasaan tidak melulu dipahami secara negatif sebagai sesuatu yang menindas dan menyengasakan (Haryatmoko 2012). Kekuasaan juga menumbuhkan resistensi. Resistensi karyawan Freeport harus dipahami sebagai akibat dari kekuasaan yang menindas dari manajemen yang diterapkan kepada pekerja selama ini. Maka sesungguhnya resistensi, keberanian melawan penindasan juga lahir berkat penindasan kekuasaan (cf. Foucault 2011).

b) *Kekuasaan itu Menyebar dengan Mekanisme Diskriminasi*

Intimidasi dilakukan oleh pekerja penduduk asli terhadap pekerja penduduk pendatang karena perbedaan upah yang diterima. Kebijakan perbedaan upah ini didasarkan atas perbedaan asal-usul genealogis ras: mereka yang terkategori sebagai ras “asli” menerima upah lebih rendah ketimbang yang “pendatang”. Dalam hal ini kekuasaan menyebar ke beberapa pihak (Kelly 2010). Setidaknya terdapat dua lapis penguasaan. Pertama, lapis manajemen sebagai penguasa, yang terkokohkan statusnya karena telah mempraktikkan manajemen perbedaan upah kepada pekerja. Kedua, lapis pekerja warga “asli” Papua yang terpantik keberaniannya untuk melancarkan aksi mogok (merasa memiliki modal melawan, secara potensial juga berkuasa). Jelas di sini bahwa kekuasaan justru lahir dari praktik diskriminasi biarpun diskriminasi itu sendiri merupakan wujud kekuasaan (Foucault 2011).

c) Teknik Panoptik Menciptakan Kepatuhan dan Kedisiplinan Pekerja

Kontrol panoptik yang dilancarkan penguasa harus dipahami secara luas. Secara sempit, kontrol kendali panoptik berbentuk pengawasan langsung yang hadir di hadapan objek yang dikuasai/diawasi. Kalau membaca berita konflik pekerja Freeport (*Berita Metro*, 28 Februari 2012), pengawasan fisik langsung seperti itu tidak ditemukan. Akan tetapi, kontrol panoptik yang halus (*subtle*) dapat dirasakan pada saat serangkaian pertemuan diselenggarakan oleh Kapolda, Pemkab Timika, dan kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama antara Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua serta Pusat. Ketika pekerja yang mogok, yang menolak mogok, dan Freeport sama-sama duduk semeja memenuhi panggilan Polda, saat itulah sesungguhnya kontrol panoptif sedang beroperasi. (O'Farrell 2007; Haryatmoko 2010). Semua pihak tergiring untuk mencari kepastian siapa dirinya dan mengerahkan segala energi untuk menahan diri (Foucault 2011). Undangan Polda Papua merupakan kontrol kendali yang tidak kasat mata, yang membuat pihak-pihak yang bersengketa “terpaksa” mematuhi regulasi dan pendisiplinan situasi.

4. Penemuan Unsur-unsur yang Absen/Terselubung

Unsur-unsur yang absen/terselubung di balik teks berita utama “Produksi Freeport Berhenti Akibat Intimidasi Karyawan” adalah: (a) apa saja faktor penyebab sekelompok pekerja (kelompok I) mengintimidasi dan menganiaya kelompok pekerja lain (kelompok II); (b) apa saja pokok-pokok Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII antara PT Freeport dan Serikat Pekerja PT Freeport; (c) mengapa narasumber berita yang diwawancarai hanya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius (p2, p5) dan juru bicara PT Freeport Ramdani Sirait (p7, p8).

Jika teks berita data utama dipelototi, tidak akan ditemukan secara eksplisit apa sebenarnya yang menyebabkan kelompok I melakukan kekerasan (intimidasi dan penganiayaan) kepada kelompok II. Tetapi, untungnya, empat kali disebut bahwa kelompok pekerja pelaku kekerasan adalah mereka yang beberapa hari sebelumnya melakukan aksi *mogok kerja*, sedang kelompok korban adalah pekerja yang tidak ikut aksi mogok tersebut (p1, p3, p9, p10). Mogok kerja ini menjadi kata kunci untuk menyingkap tabir realitas yang terselubung di balik wacana; ia menjadi *entry point* bagi pengenalan persoalan yang lebih besar.

Dengan meminta bantuan dari langkah kedua (pendalaman data), pembaca akan tergiring untuk bertanya: mengapa kelompok I nekat mogok kerja; apa yang dituntut; siapa (dari kalangan mana) sebenarnya kelompok pertama ini? (Pembaca perlu diingatkan, semua pertanyaan ini tidak akan terjawab dalam teks data pokok!). Kelompok I mogok kerja karena aspirasi mereka tentang penyetaraan upah tidak pernah ditanggapi. Tuntutan kelompok I adalah penyetaraan upah kerja mereka dengan upah kerja kelompok II. Kelompok I berasal dari tujuh suku penduduk asli Papua, sedang kelompok II dari luar Papua. (*Fajar*, 11 Oktober 2011). Adalah cukup menarik bahwa insiden unjuk rasa pekerja berujung bentrok yang melukai 9 orang dan menewaskan 1 korban tersebut (10 Oktober 2011) masih menjadi berita utama hingga lima bulan berikutnya (www.tribunnews.com, 27 Februari 2012), bahkan hingga artikel ini ditulis (Februari 2013).

Apa saja pokok-pokok Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII antara PT Freeport dan Serikat Pekerja PT Freeport merupakan unsur terselubung berikutnya. Tidak diketahui secara pasti apa isinya. Berdasarkan pengetahuan sandar pada umumnya, PKB tersebut mestinya berisi kesepakatan tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi kedua belak

pihak. Akan tetapi, terdapat wacana lain yang sering dilupakan. Padahal, hal lain tersebut justru lebih besar yang terungkap lewat media massa mengenai, a.l., fakta empiris di lapangan bahwa:

“Usaha pertambangan di Tanah Air hingga saat ini lebih banyak memicu beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan tidak terkendali, hingga ujung-ujungnya tindakan kriminal dan kekerasan. Praktik usaha ini pun belum banyak memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat (*Kompas*, 20 Februari 2012: 1)

PT Freeport Timika pun sangat rakus mengeksploitasi alam Timika dan selama bertahun-tahun mengeruk keuntungan bertriliun-triliun. Semua ini berjalan mulus berkat kolusinya dengan pejabat lokal dan oknum TNI. Rakyat Timika—seperti bisa ditebak—tetap terpuruk dalam kemelaratan dan lingkungan alam yang rusak tiada tara.

Unsur terselubung selanjutnya adalah mengapa narasumber berita yang diwawancarai hanya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius (p2, p5) dan juru bicara PT Freeport Ramdani Sirait (p7, p8). Tentu bukan kebetulan bahwa harian *Berita Metro* (28 Februari 2012) mewawancarai kedua narasumber. Dalam perspektif Foucault (Kelly, 2010; Haryatmoko, 2010), wacana merupakan praktik terorganisasi dan mengorganisasikan otonomi dan klaim atas kebenaran pengetahuan. Maka, kedua tokoh dalam konteks ini dianggap diuntungkan oleh struktur sosial yang membenarkan mereka mempraktikkan otonomi dan pengetahuan. Mengapa wartawan *Berita Metro* menanyai kedua tokoh—dan bukan tokoh lain—itu sudah menjadi *episteme*, sebagai struktur pemaknaan yang dominan pada zaman ini (cf. O'Farrell 2007; Haryatmoko 2012), sang wartawan: bahwa yang paling layak ditanyai adalah kedua tokoh; bahwa setiap ada peristiwa, yang harus diwawancarai adalah juru bicara, misalnya.

Mengapa tidak tampak hasil investigasi yang meliputi aspirasi kelompok I dan II, padahal justru kedua kelompok ini yang terlibat konflik? Lagi-lagi harus diakui bahwa struktur pemaknaan yang beroperasi dan mendominasi benak-benak kepala wartawan (episteme tadi) adalah seperti itu. Episteme yang berlaku di zaman ini adalah: orang yang dianggap paling mengetahui (yang menguasai pengetahuan) bukanlah orang yang terlibat langsung dalam suatu kasus, melainkan orang yang diakui secara struktur sosial sebagai pemegang pengetahuan tentang suatu kasus itu. Dalam perspektif Foucault, pengetahuan adalah sebuah rezim episteme yang terorganisasi dan mengorganisasi, misalnya dalam psikiatri, kedokteran, jurnalisme, ekonomi, yang sanggup mengubah konstelasi sosial dan menghasilkan sesuatu (produktif) (Haryatmoko 2012).

5. Relasi Makna Antarunsur Wacana

Ketiga unsur terselubung tersebut merepresentasikan kekhasan konsep Foucault tentang beroperasinya kekuasaan (O'Farrell 2007; Haryatmoko 2010). Representasi ini menandai dimulainya tahap selanjutnya, penentuan relasi makna antarunsur wacana, baik unsur yang manifes maupun yang laten terselubung. Menurut Foucault (2011), kekuasaan berawal dari praktik diskriminasi; kekuasaan lebih dipraktikkan ketimbang dimiliki. Praktik kekuasaan dijalankan dari tataran mikro bagai pipa kapiler (dari bawah ke atas). Kekuasaan tidak lagi melulu negatif (menindas, menyensor), tetapi juga produktif yang berasal dari individu-individu yang terhegemoni oleh sistem yang menjamin kepatuhan, normalisasi, dan kedisiplinan tubuh.

Dalam kasus konflik pekerja Freeport, praktik kekuasaan kali pertama dilancarkan oleh kelompok I (penduduk asli Papua) kepada kelompok II (pendatang dari luar Papua). Ini terjadi karena adanya diskriminasi upah di antara kedua kelompok. Konflik ini meletup di kalangan pekerja tataran bawah, kemudian berdaya kapilaritas merambat ke tataran vertikal, menggerakkan berbagai praktik kuasa baru di level manajemen dan institusi di atasnya (juru bicara Freeport [p7], Pemkab Timika [p6], Kapolda Papua [p11]). Ketika Pemkab Mimika mengharapkan laporan dari Freeport tentang kasus intimidasi antarpekerja yang mengakibatkan berhentinya produksi (p4, p5), ketika Pemkab merencanakan memfasilitasi pertemuan manajemen Freeport dan Serikat Pekerja (p6), ketika Kapolda Papua menggelar pertemuan dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT Freeport (p11), jelaslah sudah pada titik ini sedang tergelar kehendak untuk mengetahui sebagai awal dipraktikkannya dominasi terhadap objek dan manusia/kelompok lain. Strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui; ingin mengetahui berarti ingin menguasai. Kekuasaan melekat pada pengetahuan (Kelly 2010; cf. Haryatmoko 2010).

Sasaran kekuasaan adalah kepatuhan tubuh-tubuh individu, tubuh-tubuh sosial, agar produktivitas meningkat. Perbedaan antara kelompok pertama yang asli populasi Papua (ras Negroid, berkulit gelap) dan kelompok II dari luar Papua (ras Mongolid-Malayid, berkulit terang) jelas-jelas merupakan praktik politik tubuh. Foucault (dlm. Haryatmoko, 2012) memperkenalkan terminologi baru *biopolitik*, yakni pengendalian kehidupan masyarakat melalui regulasi dan normalisasi pendisiplinan tubuh penduduk, jaminan sosial, pajak, kesehatan, urbanisasi (cf. Eriyanto 2005). Dalam konteks ini perbedaan upah antara kelompok I dan kelompok II pekerja Freeport dapat dipahami sebagai praksis konkret biopolitik. Tubuh-tubuh ini dibuat patuh dan didisiplinkan melalui serangkaian aturan sistem regulasi pabrik (syarat masuk, jam kerja, target produksi, *job description*, pengupahan, sanksi, dll.) agar produktivitas Freeport meningkat. Akan tetapi, selalu saja terjadi: di mana dipraktikkan kekuasaan, di situ akan muncul perlawanan balik (Haryatmoko, 2010) sebab kekuasaan itu tersebar di mana-mana dan datang dari mana-mana.

6. Kontekstualisasi Unsur Wacana

Akhirnya, analisis terhadap teks berita “Produksi Freeport Berhenti Sementara Akibat Aksi Intimidasi Karyawan” (*Berita Metro*, 28 Februari 2012) dari perspektif analisis wacana kritis Foucault memasuki tatataraan pamungkasnya: kontekstualisasi unsur wacana kekuasaan-pengetahuan (Alba-Juez 2009). Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, unsur-unsur wacana yang berkaitan dengan ihwal kekuasaan dan pengetahuan akan dikontekstualisasikan ke dalam teks utama konflik pekerja Freeport. Kontekstualisasi tersebut dinarasikan sebagai berikut.

PT Freeport memberikan upah kepada pekerja asal penduduk asli Papua jauh di bawah upah pekerja asal luar Papua. Perbedaan ini memicu aksi mogok pekerja asli Papua. Karena tidak mendukung aksi ini, pekerja asal luar Papua dintimidasi oleh pekerja asli Papua. Konflik antarpekerja ini didamaikan melalui serangkaian pertemuan dialog antara kedua kelompok pekerja di bawah pengawasan Pemkab Timika, manajemen PT Freeport, dan Kapolda Papua. Gencarnya pendekatan dialogis ini membuat para pekerja memilih patuh dan menyudahi aksi mogok kerja dan bentrok antarpekerja serta menggiring mereka kembali bekerja normal, sehingga produktitas makin meningkat. Akan tetapi, publik pembaca menjadi lupa bahwa PT Freeport yang berkolusi dengan pejabat

lokal dan aparat militer telah mengeruk keuntungan sangat besar selama berpuluh-puluh tahun dengan mengeksploitasi habis-habisan tanah Timika, sehingga merusak lingkungan alam Timika tiada tara, sementara kehidupan rakyat Timika tetap terpuruk dalam kemelaratan.

Akhirnya, jika boleh diformulasikan, kontekstualisasi antarunsur wacana dalam teks berita di atas sbb. Perbedaan upah berdasarkan perbedaan ras di kalangan pekerja Freeport memicu konflik horizontal yang didamaikan melalui serangkaian dialog yang berlangsung di bawah kendali perusahaan, sehingga menjamin kepatuhan dan produktivitas pekerja sekaligus menutupi dampak buruk akibat eksploitasi dan kerakusan PT Freeport Indonesia.

KESIMPULAN

Wacana bagi Foucault adalah praktik kebahasaan terorganisasi yang mengkonstruksi praktik sosial untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Bahasa dalam perspektif ini juga dipandang sebagai instrumen kekuasaan. Analisis wacana akan menelaah berita konflik pekerja tambang PT Freeport Indonesia dari segi seleksi topik, pendalaman data, identifikasi tema, pencarian unsur-unsur wacana yang tersembunyi, pencarian relasi makna antar unsurwacana, dan kontekstualisasi unsur wacana dalam jaringan kekuasaan-pengetahuan, dan menghasilkan simpulan umum sbb. Perbedaan upah berdasarkan praktik politik tubuh (biopolitik) berbasis diskriminasi ras di kalangan pekerja Freeport memicu konflik horizontal yang didamaikan melalui serangkaian dialog di bawah kendali perusahaan, sebagai praktik kontrol panoptik. Kontrol ini efektif untuk meredam konflik, karena menjamin kepatuhan dan produktivitas pekerja. Akan tetapi, kontrol tersebut juga menyelubungi realitas bahwa Freeport mengeruk keuntungan sangat besar, eksploitasi Freeport merusak lingkungan, serta rakyat Timika tetap hidup dalam kemelaratan.

Menjadi terang di sini, jika yang diinginkan adalah membedah fakta serinci mungkin dari teks berita konflik pekerja PT Freeport, analisis isi (Bungin 2003) bisa digunakan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip analisis wacana biasa (Littlejohn 1996). Aplikasi analisis wacana biasa bisa menjawab prinsip dasar jurnalistik 5W + 2H (Sumadiria 2005). Akan tetapi, jika pembaca, pengamat, atau analis menuntut “lebih”, menginginkan fakta-fakta di balik teks yang manifes, yakni fakta-fakta laten terselubung, lebih baik diterapkan analisis wacana kritis versi Foucault (2011; Alba-Juez, 2009; Santoso 2010). Sesuai dengan kebutuhan, analisis wacana kritis selain versi Foucault bisa pula digunakan. Dasar pemilihan versi adalah apa tujuan analisis dan realitas fakta teks berita yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba-Juez, L. 2009. *Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Berita Metro, 22 Februari 2012. “Desak Freeport Naikkan Royalti”, hal. 1, 7.
- Berita Metro, 27 Februari 2012. “Menata Aturan Pertambangan di Indonesia: Rawan KKN, Kontrol dan Pengawasan Lemah”, hal. 5.
- Berita Metro, 28 Februari 2012. “Produksi Freeport Berhenti Sementara Akibat Intimidasi Karyawan”, hal. 5.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. 2005. “Wacana: Perspektif Foucault”, (65—84) dl. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Foucault, M. 2011. “The History of Sexuality”. <http://socialmasterpice.blogspot.com> (Akses 2 Januari 2013)

- Harsono, A. 2008. "Fakta, Fakta, Fakta" (hal. Xii—xxv) dlm. *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. A. Harsono & B. Setiyono (ed.). Jakarta: KPG & Yayasan Pantau.
- Haryatmoko. 2010. "Michel Foucault Membuka Kedok Pengetahuan, Kekuasaan, dan Kebenaran", (8-13) dlm. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. 2012. "Michel Foucault dan Politik Kekuasaan: Membongkar Teknik, Mekanisme, dan Strategi Kekuasaan". Materi *Pelatihan Analisis Wacana Michel Foucault*. UK2JT, FIB Unair, 1 Maret 2012.
- Jawa Pos*, 22 Februari 2012. "2011, Freeport Setor Rp 21 T", hal. 5.
- Jupriono, D. 2012. "Analisis Wacana Deskriptif & Analisis Wacana Kritis: Analisis Berita Konflik Buruh Tambang PT Freeport Indonesia" (17—27) dlm. *Prosiding Seminar Nasional Wacana Bahasa dan Sastra Bandingan sebagai Khasanah Nusantara*. Ed. Misnadin-Masduki. Surabaya: CV Putra Media Nusantara. <http://sastra-bahasa.blogspot.com> (Akses 2 Januari 2013)
- Jupriono, D. 2012a. "Race Discrimination as Conflict Base of Freeport Indonesia Corporation Labor in Foucault Perspective". Kertas kerja *The 3rd International Conference, Urban Mobility: Its Impacts on Socio-cultural and Health Issues*, World Health Organization (WHO) & Faculty of Humanities, Unair Surabaya, 7—8 December 2012.
- Kelly, M. 2010. "Michel Foucault". Internet Encyclopedia of Philosophy. www.iep.utm.edu/foucault/ (Akses 20 Agustus 2012)
- Kompas*, 20 Februari 2012. "Tambang Banyak Picu Masalah", (1, 15).
- Kovach, B. & T. Rosenstiel. 2001. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown Publishers.
- Kovacs, A. 2005. "The Role of a Political Identity Code in Defining the Boundaries of Public and Private: The Example of Latent Antisemitism" (269—281) dlm. *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinary*. R. Wodak & P. Chilton (ed.). Amsterdam: John Benjamins Publ. Co.
- Littlejohn, S.W. 1996. *Theories of Human Communication*. Belmont: Wardsworth Publ. Co.
- Mulyana, D. 2008. *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, Aplikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- O'Farrell, C. 2007. "Key concepts". www.michel-foucault.com/concepts/index.html
- Santoso, A. 2010. "Teori Wacana: dari Paradigma Deskriptif ke Paradigma Kritis". <http://studibahasakritis.blogspot.com/2010/05/> (Akses 20 Agustus 2012)
- Sumadiria, A.S.H. 2005. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tjandra, S. 2012. "Orientasi Gerakan Buruh". *Kompas*, 1 Mei, hal. 6.
- Van Dijk, T.A. 2005. "Contextual Knowledge Management in Discourse Production: A CDA Perspective" (71—100) dlm. *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinary*. R. Wodak & P. Chilton (ed.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
- Woodside-Jiron, H. 2004. "Language, Power, and Participation: Using Critical Discourse Analysis to Make Sense of Public Policy" (173—206) dlm. *An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education*. R. Rogers (ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Tabel 2 Satuan Data dari Berita Metro, 28 Februari 2012

NO	SATUAN DATA	PARAGRAF
1	PT Freeport Indonesia menghentikan sementara proses produksinya sejak Jumat (24/2) karena terjadi aksi intimidasi bahkan penganiayaan oleh para karyawan yang beberapa waktu lalu menggelar mogok kerja di Timika.	I
2	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius Mameyau kepada ANTARA di Timika, Senin, membenarkan terhentinya proses produksi PT Freeport selama beberapa hari terakhir.	II
3	Intimidasi yang dilakukan karyawan peserta mogok kerja terhadap rekan-rekan mereka tidak terjadi di seluruh areal kerja PT Freeport tapi hanya di beberapa titik sehingga manajemen yang menangani langsung di lapangan mengambil keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas produksi," jelas Dionisius, Senin (27/2)	III
4	... hingga saat ini manajemen PT Freeport belum memberikan laporan secara resmi tentang	IV

	situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi perusahaan kepada Pemkab Mimika hingga memicu terhentinya aktivitas produksi perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu	
5	“Laporan secara resmi dari manajemen Freeport belum ada sehingga kami tidak tahu persis permasalahan apa yang terjadi, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk membangun komunikasi antara manajemen dengan karyawan,” ujar Dionisius.	V
6	Terkait kondisi yang terjadi di lingkungan PT Freeport tersebut, Pemkab Mimika akan memanggil manajemen PT Freeport dan pihak Serikat Pekerja untuk menanyakan masalah yang terjadi dan berupaya mencari solusi bersama untuk menyelesaikannya.	VI
7	Pertemuan yang difasilitasi Pemkab Mimika direncanakan berlangsung pada Kamis (1/3). Juru Bicara PT Freeport Ramdani Sirait mengakui saat ini terjadi gangguan operasional dalam rangka memulihkan kembali operasi perusahaan.	VII
8	... PT Freeport telah mengikuti semua persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII yang ditandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu dengan pihak Serikat Pekerja.	VIII
9	Di antara pekerja yang kembali bekerja terdapat beberapa yang telah melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap rekan-rekan mereka yang tidak mengikuti aksi mogok kerja dan terhadap para penyeliannya,” tutur Ramdani.	IX
10	Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa untuk membicarakan masalah yang terjadi antara karyawan yang mogok kerja dengan rekan-rekan mereka yang tidak ikut mogok kerja ...	X
11	Bersamaan dengan itu pada Senin siang sejumlah Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja PT Freeport menggelar pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Pol Bigman Lumban Tobing bertempat di Hotel Rimba Papua, Timika.	XI